

Perkawinan Anak di Masa Krisis: Pelajaran dari Pandemi COVID-19 dan Implikasi Kebijakan

Intan Noor Hanifa,^{1*}

¹Tutor, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Artikel Tinjauan Pustaka

Abstrak

Kata Kunci:

Perkawinan anak, COVID-19, krisis sosial-ekonomi

Riwayat Artikel:

Dikirim: 23 Juli 2024

Diterima: 31 Juli 2024

Terbit: 31 Juli 2024

Korespondensi Penulis:

247110403@uii.ac.id



Latar belakang: Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan angka pernikahan anak tertinggi dalam dua dekade terakhir dan mengancam kemajuan *Sustainable Development Goal (SDG) 5* tentang kesetaraan gender.

Tujuan: Untuk lebih memahami faktor-faktor penentu pernikahan anak selama pandemi, makalah tinjauan ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi tersebut dan memberikan strategi untuk mencegahnya.

Metode: Kami melakukan pencarian literatur pada Maret 2023 di PubMed dan *Cochrane Library* untuk mengumpulkan studi tentang masalah ini. UNICEF memperkirakan adanya tambahan 10 juta remaja perempuan yang menghadapi risiko pernikahan anak akibat pandemi. Namun, prevalensi nasional tingkat pernikahan anak selama pandemi COVID-19 masih terbatas.

Hasil: Studi ini menemukan bahwa angka pernikahan anak

tertinggi secara global terjadi di Afrika Sub-Sahara (35%) dan Asia Selatan (29%), serta India dengan jumlah absolut pengantin anak perempuan tertinggi (15,6 juta). Bukti-bukti tersebut mendukung beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan anak: alasan ekonomi, penutupan sekolah, pengaruh sosial budaya, dan kurangnya kesadaran akan konsekuensinya.

Kesimpulan: Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, mempertaruhkan kesehatan dan kesejahteraan remaja perempuan, merampas masa kecil dan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan, sehingga melemahkan dua generasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multidisiplin antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengurangi risiko pernikahan anak dalam keluarga yang rentan di masa krisis.

Abstract

Background: The COVID-19 pandemic has caused the highest increase rate of child marriage in the last two decades and threatens the progress in Sustainable Development Goal (SDG) 5 of gender equity. **Objective:** To better grasp the determinant factors of child marriage during a pandemic, this review paper presents a comprehensive picture of the conditions and provides strategies to prevent them. **Method:** We conducted literature searches in March 2023 in PubMed and Cochrane Library to

gather studies on this issue. UNICEF predicted an additional 10 million adolescent girls facing the risk of child marriage due to the pandemic. However, the national prevalence of child marriage rate during the COVID-19 pandemic is limited. Result: This study found that the highest child marriage rate globally is in Sub-Saharan Africa (35%) and South Asia (29%), and India with the highest absolute number of girl brides (15.6 million). The evidence supports several factors contributing to child marriage: economic reasons, school closure, sociocultural influences, and lack of awareness towards the consequences. Conclusion: Child marriage is a human rights violence, risking the health and well-being of adolescent girls, robbing their childhood and chance to education, hence weakening two generations. Therefore, this study suggests that multidisciplinary collaboration between governments, schools, communities, and private sectors is essential to mitigate the risk of child marriage in vulnerable families in times of crisis.

KEYWORDS: *child marriage, COVID-19 pandemic, social-economy crisis*

1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tren pernikahan anak selama pandemi COVID-19 sangat mengkhawatirkan. Seperti yang telah disorot oleh banyak penelitian dan advokasi kebijakan sebelumnya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, namun secara khusus juga membawa dampak ketidaksetaraan gender pada anak-anak dan remaja perempuan. Sebagai contoh, berita lokal di Bangladesh melaporkan kematian seorang gadis berusia 14 tahun yang meninggal dalam waktu satu bulan setelah menikah karena pendarahan alat kelamin yang berlebihan pada bulan Oktober 2020.¹ Pada awal tahun 2022, seorang gadis berusia 14 tahun dilaporkan bunuh diri karena keluarganya menekannya untuk menikah dengan seorang pria berusia 40 tahun.²

Selama pandemi atau di masa krisis, remaja perempuan di masyarakat dengan sosioekonomi rendah cenderung lebih terdampak oleh berbagai konsekuensi. Mereka dipaksa menikah dini dan berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender dan eksploitasi seksual, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai wujud diskriminasi gender yang tercermin dalam norma sosial, anak perempuan juga dilaporkan memiliki tanggung jawab rumah tangga yang lebih besar dan putus sekolah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibandingkan dengan anak laki-laki.^{3,4} Sebuah penelitian di Norwegia selama pandemi melaporkan bahwa remaja perempuan juga secara signifikan lebih berisiko mengalami semua bentuk pelecehan kecuali pelecehan fisik dibandingkan anak laki-laki, termasuk pelecehan psikologis, pelecehan seksual, pelecehan seksual secara online, dan menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Selain itu, statistik menunjukkan bahwa pernikahan anak di kalangan anak perempuan kira-kira enam kali lebih umum terjadi dibandingkan anak laki-laki secara global. Menurut UNICEF, pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan formal atau informal antara anak di bawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lain. Sebelum pandemi, diperkirakan 100 juta anak perempuan berisiko menikah sebelum berusia 18 tahun dalam dekade mendatang.⁶ Namun, situasi ini telah memburuk, dengan tambahan 10 juta anak perempuan yang kini menghadapi risiko pernikahan anak akibat pandemi.⁶ Meskipun angka pernikahan anak secara global menurun secara bertahap selama beberapa dekade terakhir, prediksi ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 25 tahun terakhir.⁷

Perkawinan anak meningkat selama pandemi sebagai konsekuensi dari ketidakstabilan ekonomi akibat hilangnya pekerjaan dan pendapatan, serta meningkatnya pekerja anak dan eksploitasi anak.⁸ Situasi ini memburuk dengan tekanan inflasi yang sedang berlangsung dan konflik Ukraina yang memperburuk konsekuensi ekonomi dari pandemi COVID-19. Menurut Bank Dunia, kenaikan biaya pangan dan energi merupakan masalah global yang dapat mendorong tambahan 75-95 juta orang ke dalam kemiskinan.⁹ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah anak-anak dan terutama remaja perempuan dari keluarga yang rentan, agar tidak mengalami eksploitasi lebih lanjut.

Makalah ini bertujuan untuk meninjau dampak pandemi COVID-19 terhadap prevalensi pernikahan anak, menganalisis faktor-faktor penentu dan dampak pernikahan anak, dan lebih jauh lagi menyajikan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak selama krisis ekonomi, khususnya di beberapa negara dengan prevalensi pernikahan anak yang tinggi.

2. METODOLOGI

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Maret 2023 di PubMed dan Cochrane Library dengan menggunakan kombinasi istilah-istilah berikut (*child marriage* OR forced marriage* OR early marriage**) AND (*COVID-19 OR pandemic OR crisis*) AND (*exploitation OR abuse OR maltreatment*). Referensi yang relevan juga dicari secara manual dari studi yang disertakan. Data tambahan tentang prevalensi pernikahan anak dan kondisi krisis ekonomi saat ini didukung oleh pencarian Google di situs web UNICEF, Girls not Bride, dan Bank Dunia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prevalensi pernikahan anak selama Pandemi COVID-19

Menurut data terbaru dari UNICEF, angka pernikahan anak tertinggi ditemukan di Afrika Sub-Sahara (35%), diikuti oleh Asia Selatan (29%). Nigeria memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi (76%), yang berarti tiga dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.¹⁰ Dalam hal jumlah absolut berdasarkan demografi populasi, India memiliki jumlah pengantin perempuan yang paling signifikan yaitu sekitar 15,6 juta, diikuti oleh Bangladesh dengan 4,3 juta. Meskipun angka pernikahan anak di Pakistan, Indonesia, dan Filipina berada di bawah 20%, negara-negara ini masih berada di peringkat sepuluh besar dalam hal jumlah absolut pernikahan anak secara global.¹¹

Pandemi COVID-19 telah sangat mempengaruhi prevalensi pernikahan anak, karena pandemi ini memperparah kesulitan yang dialami oleh populasi yang rentan dan menciptakan tekanan tambahan pada sistem penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang sudah sangat terbebani. Diperkirakan ada tambahan 500.000 pernikahan anak dan 1 juta kehamilan remaja yang terjadi dalam satu tahun setelah pandemi dimulai.⁷ Pada akhir tahun 2021, Bangladesh melaporkan peningkatan pernikahan anak setidaknya sebesar 13% selama karantina wilayah pada pandemi COVID-19.¹² Sebuah survei di 21 distrik di Bangladesh menemukan bahwa sebanyak 13886 pernikahan anak terjadi hanya dalam kurun waktu 6 bulan, antara bulan Maret hingga September 2020.¹² Di Indonesia, Kementerian Agama dilaporkan menerima 34.413 permohonan pernikahan di bawah umur pada bulan Januari dan Juni 2020, yang menunjukkan peningkatan sebesar 45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.¹³ Namun, jumlah tersebut mungkin lebih rendah karena pada kenyataannya, banyak pernikahan anak di Indonesia yang dilakukan

secara agama dan tidak didaftarkan ke pemerintah sampai mempelai perempuan mencapai usia minimum yang disyaratkan.¹³

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Masa Pandemi

Faktor-faktor penentu pernikahan anak bisa jadi sangat kompleks dan berbeda-beda di setiap negara. Di negara-negara Asia, pernikahan secara luas dianggap sebagai kewajiban sosial, agama, dan budaya, yang seringkali mengabaikan pilihan pribadi anak karena tradisi patriarki dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentu perkawinan anak, terutama di masa pandemi COVID-19.

3.2.1. Alasan ekonomi

Bergantung pada kondisi sosial ekonomi mereka, keluarga-keluarga merespons secara berbeda terhadap hilangnya pendapatan atau kesulitan ekonomi. Khususnya dalam konteks krisis ekonomi dan kemanusiaan, banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak dipandang sebagai cara untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sulit. Sebagai contoh, setelah tsunami di Indonesia, India, dan Sri Lanka pada tahun 2004, terjadi peningkatan pernikahan paksa pada anak perempuan berusia 15-17 tahun, terutama mereka yang kehilangan orang tua mereka sehingga mereka dapat menerima bantuan dan dukungan tambahan dari negara untuk keluarga.¹⁴ Di Bangladesh dan Somalia, pada masa kekurangan pangan dan kekeringan, anak perempuan sering dianggap sebagai 'beban' bagi rumah tangga yang dapat dihilangkan.¹⁴ Keluarga sering dianggap berinvestasi lebih banyak pada anak laki-laki daripada anak perempuan dalam situasi ekonomi yang sulit, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka.¹⁵

Menurut laporan UNICEF, kemiskinan sangat terkait dengan pernikahan anak. Perempuan dari kuintil termiskin 2,5 kali lebih mungkin untuk menikah di masa kecil mereka dibandingkan dengan perempuan dari kuintil terkaya. Di India, usia rata-rata untuk menikah secara signifikan lebih rendah untuk perempuan dari kuintil termiskin (15,4 tahun) dibandingkan dengan kuintil terkaya (19,7 tahun).¹⁶ Para orang tua menikahkan anak perempuan mereka untuk meringankan beban mereka dalam merawat anak perempuan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam budaya tertentu di mana mempelai pria harus membayar maskawin kepada keluarga perempuan, anak perempuan yang lebih muda sering dianggap lebih berharga karena mereka dianggap memiliki lebih banyak waktu untuk mengabdikan kepada keluarga dan melahirkan lebih banyak anak.¹⁵ Sebaliknya, pengantin perempuan yang lebih muda dianggap lebih murah dalam budaya di mana keluarga perempuan membayar mas kawin untuk pernikahan, dan kedua budaya ini menguntungkan terjadinya perkawinan dini.¹⁴ Selama pandemi COVID-19, banyak pernikahan diadakan oleh keluarga dari latar belakang sosial ekonomi rendah karena mereka melihat pembatasan sosial sebagai kesempatan untuk mengadakan perayaan pernikahan sederhana tanpa menghabiskan banyak uang.

3.2.2. Penutupan sekolah

Penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan lonjakan pernikahan anak selama pandemi. Berada di sekolah dapat membantu melindungi anak perempuan dari kawin paksa, tidak hanya dengan membuat mereka tetap sibuk tetapi juga dengan dukungan dan bantuan dari teman dan guru untuk menentang keluarga jika mereka dipaksa menikah.¹⁰ Penutupan sekolah tidak hanya meningkatkan risiko kawin paksa, tetapi juga meningkatkan kerentanan anak perempuan untuk mengalami pelecehan fisik dan seksual baik oleh teman sebayanya atau laki-laki yang lebih tua yang menganggur karena mereka sering berada di rumah tanpa pengawasan.^{15,17} 47% remaja korban pelecehan seksual daring

mengalaminya untuk pertama kali selama pandemi, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu secara daring.⁵ Beberapa keluarga dengan kerentanan ekonomi berjuang untuk mengikuti perangkat teknologi dan internet yang diperlukan untuk mengikuti kelas, memaksa jutaan anak perempuan putus sekolah.¹⁷ Sebuah penelitian di Kenya menunjukkan bahwa remaja perempuan di sekolah menengah yang mengalami penutupan sekolah selama enam bulan memiliki risiko tiga kali lipat untuk putus sekolah dan dua kali lipat untuk hamil dibandingkan dengan siswi yang sama yang lulus sebelum karantina COVID-19.¹⁸

3.2.3. Perkawinan anak sebagai konsekuensi dari dinamika sosial budaya

Kepercayaan tradisional juga menjadi salah satu faktor yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka secara dini. Di beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari perzinahan dan seks pranikah.¹⁴ Hal ini juga dapat menjadi alasan bagi orang tua untuk mempertahankan prinsip agama mereka, karena negara-negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi memiliki mayoritas penduduk Muslim, seperti Nigeria (98,3%) dan Bangladesh (90,4%).¹³ Di Bangladesh, terjadi peningkatan insiden pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kontak fisik yang tidak diinginkan yang dilaporkan selama pandemi, sehingga orang tua merasa tidak aman dan menikahkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk melindungi mereka.¹⁵ Selain dampak pandemi, dua penelitian di Indonesia menyebutkan adanya kepercayaan yang sudah berlangsung lama bahwa perempuan yang belum menikah pada usia dua puluh tahun dianggap perawan tua dan menjadi beban bagi keluarga.^{13,19} Studi yang sama juga menemukan mitos bahwa jika seorang gadis menolak lamaran pernikahan, mereka akan cenderung menjadi perawan tua. Pada saat yang sama, ada juga persepsi tentang nasib buruk dan kemakmuran jika seorang perempuan terlambat menikah atau tetap melajang, dan bahwa pernikahan dini dapat membantu melindungi reputasi keluarga.¹³

3.2.4. Kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari pernikahan anak

Selain pengaruh sosial budaya yang telah berlangsung lama yang mendorong pernikahan dini, alasan lain mengapa pernikahan anak masih menjadi masalah yang terus berlanjut adalah kurangnya kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan anak. Tingkat literasi dan pendidikan orang tua ditemukan sebagai faktor penentu yang signifikan dalam menentukan usia pernikahan. Sebuah studi di India menemukan bahwa dari mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun, 46% memiliki ayah yang buta huruf, dan 77% memiliki ibu yang buta huruf.²⁰ Sebuah studi di Sulawesi Selatan, Indonesia, salah satu daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi, menemukan bahwa satu dari empat orang tua dan remaja setuju bahwa ketika seorang anak mencapai usia pubertas, mereka dianggap sudah siap untuk menikah, terlepas dari usia mereka.¹⁹ Namun, sebuah studi kualitatif dengan remaja perempuan di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, menemukan bahwa sebagian besar pernikahan dini selama pandemi terjadi karena kemauan remaja itu sendiri. Karena stres dan kebosanan yang tinggi akibat sekolah daring dan meningkatnya tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah selama karantina wilayah, beberapa remaja menyatakan bahwa pernikahan adalah pelarian dari tuntutan orang tua dan perasaan kesepian.¹³ Studi ini menunjukkan kesalahan persepsi remaja yang menganggap pernikahan sebagai rencana alternatif untuk situasi yang kompleks dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap konsekuensi pernikahan anak, sehingga memberikan persetujuan kepada mereka.

3.3. Dampak Pernikahan Anak

Perkawinan usia anak memiliki dampak kesehatan yang signifikan, termasuk tingginya angka kematian dan kesakitan ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Kehamilan remaja juga dikaitkan dengan risiko prematuritas dan bayi dengan berat badan rendah yang lebih tinggi.²¹

Pengantin anak sering kali tidak dapat secara efektif menegosiasikan hubungan seks yang lebih aman, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV, dan kurangnya penggunaan kontrasepsi, yang menyebabkan tingginya tingkat kesuburan, jarak kelahiran yang pendek, kehamilan yang tidak diinginkan, dan peningkatan morbiditas reproduksi.^{21,22} Di negara berkembang, sekitar 12 juta anak perempuan berusia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya.²³ Ironisnya, perempuan yang menikah saat masih anak-anak lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perawatan medis selama kehamilan dan melahirkan di fasilitas kesehatan daripada perempuan yang menikah saat dewasa.²² Masalah ini mungkin terkait dengan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan karena sebagian besar pernikahan anak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Pernikahan dini dikaitkan dengan risiko tinggi kekerasan fisik dan emosional, isolasi sosial, dan kesehatan mental yang buruk. Banyak penelitian telah menunjukkan bukti bahwa pernikahan dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mood, kecemasan, depresi, dan gangguan kejiwaan lainnya di usia yang lebih tua dibandingkan mereka yang menikah di usia yang lebih muda.²² Pengantin anak sering kali terputus dari keluarga dan teman dan memiliki sistem pendukung yang terbatas. Sementara itu, mereka harus bertanggung jawab untuk merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga meskipun mereka masih anak-anak. Pernikahan anak pada akhirnya melemahkan dua generasi, karena kesehatan mental yang buruk dari seorang ibu akan dikaitkan dengan risiko tambahan untuk mengembangkan masalah perilaku dan emosional pada anak-anak.²⁴

Kemiskinan merupakan faktor penentu sekaligus konsekuensi dari pernikahan anak, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih mungkin untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan perempuan yang menikah di atas 18 tahun (13,8% vs 10,1%).¹⁹ Sebagian besar anak perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menikah dini tidak dapat mengakses pendidikan lebih lanjut dan putus sekolah. Padahal, pendidikan yang lebih baik adalah kunci bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan mengakhiri siklus kemiskinan keluarga.

3.4. Strategi untuk Mencegah Perkawinan Anak

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor penentu penyebab terjadinya perkawinan anak di masa pandemi, bagian ini akan memaparkan beberapa intervensi untuk mencegah perkawinan anak berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan global, yang diperparah dengan meningkatnya inflasi akibat konflik di Ukraina. Bank Dunia memproyeksikan bahwa krisis ganda ini akan mengakibatkan tambahan 23,3-26,5 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan di Afrika Sub-Sahara.⁹ Menyadari bahwa alasan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pernikahan anak, maka menangani mekanisme penanggulangan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi saat krisis sangatlah penting. Rumah tangga dengan latar belakang sosial ekonomi rendah cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan inflasi saat ini dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Karena banyak keluarga yang rentan bekerja di sektor informal, mereka sering kali tidak

memiliki akses terhadap kredit, asuransi, dan perlindungan sosial selama krisis atau keadaan darurat.⁴ Untuk mengurangi dampak dari isu-isu tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan perlindungan sosial yang menjamin keamanan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak akan lagi menganggap perkawinan anak sebagai cara untuk bertahan hidup.

Selain itu, intervensi yang bertujuan untuk mengurangi stres orang tua selama krisis dapat membantu melindungi kesejahteraan anak-anak dalam keluarga yang rentan. Seperti yang diungkapkan oleh remaja Indonesia, orang tua justru memberikan tekanan yang lebih besar kepada mereka selama pandemi, yang membuat mereka mempertimbangkan pernikahan sebagai jalan keluar. Jika orang tua dapat menjadi tangguh, mereka dapat memberikan dukungan finansial dan emosional kepada anak-anak mereka selama krisis.

Sekolah memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan anak. Pertama, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka terhadap tubuh dan integritas seksual mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler positif yang memupuk minat dan bakat mereka. Kedua, sekolah dapat menjadi titik akses bagi siswa yang membutuhkan dukungan psikososial. Guru dapat melakukan intervensi untuk mendukung siswa yang mengalami pelecehan seksual atau dipaksa menikah dan bernegosiasi dengan orang tua mereka. Terakhir, sekolah dapat menyediakan makanan gratis atau makanan untuk siswa dari keluarga yang rentan, sehingga meringankan beban ekonomi orang tua mereka. Di daerah-daerah di mana anak perempuan menghadapi kesulitan untuk mengakses sekolah formal, lembaga pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dapat membantu mengurangi kemungkinan anak perempuan dipaksa menikah.⁴

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan para pemangku kepentingan tentang meningkatnya kerentanan anak-anak, terutama anak perempuan, selama masa krisis. Pemerintah harus memperkuat implementasi undang-undang terkait pernikahan di bawah umur, memperketat pengawasan terhadap permintaan dispensasi untuk pernikahan di bawah umur dan pernikahan siri, serta menegakkan peraturan yang ada saat ini dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelanggarnya. Selain itu, bagi anak perempuan yang sudah terlanjur menikah, pemerintah dapat memastikan aksesibilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk konsultasi keluarga berencana untuk mencegah komplikasi dari kehamilan dini yang tidak diinginkan, serta dukungan yang mudah diakses bagi para korban pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dan perempuan.

Pernikahan anak secara luas dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia; oleh karena itu, beberapa organisasi telah bekerja untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang kesetaraan gender dengan mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030. Namun, kemajuan telah terhambat di beberapa negara, terutama karena gangguan layanan kesehatan dan program yang tertunda selama *lockdown*.⁶ Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kesadaran akan bahaya pernikahan anak, terutama di kalangan orang tua yang sering menjadi pemicu utama pernikahan tersebut. Mengatasi kepercayaan sosial budaya yang mengakar yang mendorong pernikahan dini harus melibatkan semua pihak di masyarakat, misalnya, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa pernikahan adalah cara untuk menghindari kehamilan di luar nikah atau pergaulan bebas. Karena tingkat pernikahan anak lebih tinggi di daerah pedesaan, kesadaran dapat disebarkan melalui pendidikan berbasis komunitas dan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan masyarakat yang terlatih.

Sementara itu, advokasi teman sebaya dan kampanye media sosial juga dapat digunakan untuk melibatkan remaja.

4. KESIMPULAN

Penting untuk menyebarkan kesadaran bahwa pernikahan anak tidak hanya merampas masa kecil dan kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pandemi COVID-19 telah terbukti meningkatkan angka pernikahan anak karena beberapa faktor: kesulitan ekonomi, penutupan sekolah, kepercayaan sosial-budaya, dan kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi pernikahan dini. Mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi dan krisis biaya hidup saat ini sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari keluarga yang rentan terjerumus ke dalam pernikahan paksa. Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, sekolah, ahli kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk memprioritaskan dan meringankan masalah ini.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan makalah ini

Referensi

1. Dhaka Tribune. How a child bride died 34 days after marriage [Internet]. Dhaka Tribune. 2020. Available from: <https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2020/10/27/how-a-child-bride-died-34-days-after-marriage>
2. Dhaka Tribune. Stopping child marriage must be a priority [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 8]. Available from: <https://www.dhakatribune.com/editorial/2022/04/22/stopping-child-marriage-must-be-a-priority>
3. Kyeremateng R, Oguda L, Asemota O. COVID-19 pandemic: Health inequities in children and youth. *Arch Dis Child*. 2022;107(3):297–9.
4. Shukla S, Ezebuihe JA, Steinert JI. Association between public health emergencies and sexual and reproductive health, gender-based violence, and early marriage among adolescent girls: a rapid review. *BMC Public Health* [Internet]. 2023;23(1):1–14. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15054-7>
5. Augusti EM, Sætren SS, Hafstad GS. Violence and abuse experiences and associated risk factors during the COVID-19 outbreak in a population-based sample of Norwegian adolescents. *Child Abuse Negl*. 2021;118(November 2020).
6. UNICEF. Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 8]. Available from: <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
7. Cousins S. 2.5 million more child marriages due to COVID-19 pandemic. *Lancet* (London, England). 2020;396(10257):1059.
8. Gupta S, Jawanda MK. The impacts of COVID-19 on children. *Acta Paediatr Int J Paediatr* [Internet]. 2020;109:2181–3. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15484>
9. Mahler DG, Yonzan N, Hill R, Lakner C, Wu H, Yoshida N. Pandemic, prices, and poverty [Internet]. Data Blog (/Opendata). 2022 [cited 2023 Apr 11]. Available from: <https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty>

10. UNICEF. Child Marriage [Internet]. 2022 [cited 2023 Apr 12]. Available from: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
11. Girls not brides. Top 20 Child Marriage Prevalence and Burden [Internet]. 2022 [cited 2023 Apr 12]. Available from: <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/>
12. Hossain MJ, Soma MA, Bari MS, Emran T Bin, Islam MR. COVID-19 and child marriage in Bangladesh: Emergency call to action. *BMJ Paediatr Open*. 2021;5(1):19–20.
13. Rahiem MDH. COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abus Negl*. 2021;118.
14. Kumala Dewi LPR, Dartanto T. Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Child Youth Stud* [Internet]. 2019;14(1):24–35. Available from: <https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>
15. Afrin T, Zainuddin M. Spike in child marriage in Bangladesh during COVID-19: Determinants and interventions. *Child Abus Negl*. 2021;112.
16. UNICEF. Ending Child Marriage. Progress and prospects [Internet]. UNICEF, New York. 2014. Available from: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Child-Marriage-Brochure-HR_164.pdf
17. UNESCO. COVID-19 school closures around the world will hit girls hardest [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 8]. Available from: <https://www.unesco.org/en/articles/COVID-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest>
18. Zulaika G, Bulbarelli M, Nyothach E, Van Eijk A, Mason L, Fwaya E, et al. Impact of COVID-19 lockdowns on adolescent pregnancy and school dropout among secondary schoolgirls in Kenya. *BMJ Glob Heal*. 2022;7(1):1–9.
19. Wibowo HR, Ratnaningsih M, Goodwin NJ, Ulum DF, Minnick E. One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *Lancet Reg Heal - West Pacific* [Internet]. 2021;8:100103. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
20. Sandhu NK, R. G. G. Determinants and impact of early marriage on mother and her newborn in an urban area of Davangere: a cross-sectional study. *Int J Community Med Public Heal*. 2017;4(4):1278.
21. Murewanhema G. Adolescent girls, a forgotten population in resource-limited settings in the COVID-19 pandemic: implications for sexual and reproductive health outcomes. *Pan Afr Med J*. 2020;37(Supp 1):41.
22. Fan S, Koski A. The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health* [Internet]. 2022;22(1):1–17. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
23. WHO. Adolescent and young adult health [Internet]. 2022 [cited 2023 Apr 12]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>
24. von Dadelszen P, Bhutta ZA, Sharma S, Bone J, Singer J, Wong H, et al. The Community-Level Interventions for Pre-eclampsia (CLIP) cluster randomised trials in Mozambique, Pakistan, and India: an individual participant-level meta-analysis. *Lancet*. 2020;396(10250):553–63.

